



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUDHUHA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 654396

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.022.300.000

1. Tanah Seluas 582 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 1.267 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 913 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MERANTI, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 772.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 506 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 551.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 205.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA NF11T11C01 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH RUSH 1.5 S A/T (F800RE-GQGFJ) Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.600.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	536.317.922
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.808.217.922
III. HUTANG	Rp.	343.939.979
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.464.277.943

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.